

BAB III

PELUANG DAN PERAN INDONESIA SEBAGAI KETUA IORA DI PERIODE 2015-2017

Bab sebelumnya telah membahas mengenai Samudera Hindia, keorganisasian IORA, dan peran IORA bagi negara anggota. Pada bab ini akan lebih diarahkan kepada aktor yang kedua, yaitu Indonesia. Bab ini akan membahas profil Indonesia terkait perannya sebagai ketua IORA, dan juga visi Poros Maritim Dunia.

A. IORA dan Visi Poros Maritim Dunia

Bagi Presiden Joko Widodo adanya visi Poros Maritim Dunia (PMD) ini sebenarnya sudah ada sejak masa kampanye pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2014. Bahkan visi PMD dan IORA tercatat pada rumusan visi misi Joko Widodo ketika kampanye, tertulis bahwa penerapan visi PMD juga akan melibatkan peran Indonesia di organisasi kawasan, yaitu IORA terutama di bidang Politik Internasional dan Ketahanan Nasional. (Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, 2014)

”Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,” serta “Mendorong kerja sama maritim komprehensif di kawasan, khususnya melalui IORA.”

Salah satu contoh gambaran dari visi ini ketika kampanye pemilihan presiden tahun 2014 adalah membangun kekuatan maritim Indonesia, salah satunya melalui ide pembangunan “tol laut” yang akan menghubungkan perairan antar pulau dan antar negara di Indonesia. Pasca pengumuman terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Joko Widodo juga mendeklarasikan kemenangannya diatas kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai tekad kuat perwujudan pembangunan identitas Indonesia sebagai negara maritim (Darmawan, 2014).

Dalam upaya penerapan visi tersebut, Joko Widodo juga mendeklarasikan tekadnya saat pidato pelantikan dirinya sebagai Presiden. Pidato ini disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2014, di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). (Muhamad, 2014)

“Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk, dan kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga ‘Jalesveva Jayamahe’, di laut justru kita jaya, sebagaimana semboyan kita di masa lalu, bisa kembali”.

Sementara bagi dunia internasional, berselang satu tahun semenjak terpilih yaitu November 2015, pada KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan gagasannya akan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (Presiden RI, 2015).

Dalam konferensi tersebut Joko Widodo menegaskan bahwa:

“Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa,”.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
3. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

4. Menerapkan Diplomasi Maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
5. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan Keamanan Maritim (Kementrian Luar Negeri, 2014).

Meskipun bermula dari janji kampanye, namun bisa dibbilang rumusan ini juga merupakan hasil kajian strategis yang telah melalui pertimbangan yang cukup matang. Gagasan mengenai poros maritim yang Joko Widodo bawa ini merupakan gagasan strategis yang menekankan adanya saling keterhubungan antar pulau, pengembangan industri dan perekonomian yang bersifat bahari seperti perikanan, wisata dan kapal, perbaikan sarana transportasi laut, kemandirian maritim serta pengembangan sosial-kemanusiaan dan kebudayaan. Pertimbangan munculnya gagasan ini juga berdasarkan kekuatan geopolitik dan geostrategis yang memang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah equator yang secara SDA memiliki banyak potensi seperti keanekaragaman makhluk hidup, melimpahnya potensi perikanan, keindahan pariwisata alam, dan SDA yang lain.

Menurut Gindarsyah, ide utama dari visi Poros Maritim Dunia ini adalah mempertegas arti dari negara kepulauan. Joko Widodo melihat bahwa adanya laut yang mengelilingi kepulauan Indonesia merupakan potensi ekonomi dan kekuatan nasional, bukan merupakan hambatan dari alam. Dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian Indonesia, visi PMD ini akan mendukung peningkatan perhubungan kemaritiman dan infrastruktur. Peningkatan ini seperti pembangunan “tol laut”, pelabuhan laut dalam (*deep seaports*) dan jaringan logistik.

Selain itu pembangunan juga dapat berupa membangun pariwisata maritim, perikanan dan industri angkutan barang.

Dalam jangka panjang visi PMD ini juga dapat mendukung adanya “kedaulatan pangan” melalui pemanfaatan dan keberlanjutan sumberdaya maritim di laut. Sehingga keutamaan dari PMD adalah memang adanya mengkonsepsi ulang kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, dan secara geostrategis terletak di antara jalur kepentingan bagi banyak pihak (Gindarsyah & Priamarizki, 2015).

Kemudian dalam kalimat mengarungi dua samudera yang dimaksud Joko Widodo adalah Indonesia juga bersebelahan dengan dua samudera, yaitu samudera Pasifik dan Hindia. Kedua samudera ini jelas memiliki potensi besar, terutama mengenai jalur lintas komoditas antar negara. Oleh karena itu, Joko Widodo menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur, pelayanan, fasilitas, akses dan modernisasi pelabuhan di Indonesia demi terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Membahas lebih jauh mengenai visi PMD, meskipun kalimat ‘Poros Maritim Dunia’ mengindikasikan bahwa Indonesia sudah bisa disebut sebagai negara maritim, namun perlu dipahami bahwa masih ada terdapat beberapa pendapat terkait hal ini. Apabila merujuk pada penyebutan oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa dokumen seperti “Rencana Strategis Kemlu 2015-2019”, terdapat Visi Pembangunan Tahun 2015-2019, dimana pada misi ke 3 terdapat kalimat “Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim”. Dalam penjelasan visi misi juga disebutkan bahwa Negara Maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan mengelola wilayah lautnya untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan serta membangun konektivitas dan pertahanan maritim. Dengan demikian pemerintah Indonesia telah

menganggap bahwa Indonesia adalah negara maritim (Kementrian Luar Negeri, 2015).

Sementara untuk menjadi negara maritim, menurut beberapa prasyarat yang ditetapkan oleh para ahli kemaritiman seperti Alfred Thayer Mahan dan Geoffrey Till, Indonesia belum mampu disebut sebagai negara maritim. Satu-satunya status yang dimiliki oleh Indonesia berkaitan dengan sifat wilayah kelautannya adalah pengakuan sebagai negara kepulauan oleh Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 pada 16 November 1994 oleh PBB. Hasim Djalal seorang pakar Hukum Laut mengungkapkan bahwa Negara Maritim adalah negara yang mampu memaksimalkan potensi kelautannya meskipun bisa saja tidak memiliki banyak wilayah laut, namun memiliki kemampuan dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan sebagainya untuk pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut tersebut. Baik secara kekayaan sumberdaya maupun kekayaan strategis. Sehingga memang, pemahaman mengenai negara maritim dengan negara kepulauan merupakan pemahaman yang berbeda. Lebih lanjut menurut Hasim Djalal, visi PMD ini sebenarnya merupakan bentuk keinginan dari Indonesia sebagai negara kepulauan yang sedang menginginkan atau bercita-cita menjadi negara maritim. Meskipun di wilayah yang sama namun di era sebelumnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahitlah yang mendapatkan julukan itu bukan Indonesia. Apabila visi PMD ini ingin benar-benar terwujud, Indonesia harus mampu untuk menjadi negara maritim terlebih dahulu, dengan memaksimalkan potensi kemaritiman yang dimiliki (Muhamad, 2014).

Terlepas dari perbedaan pemahaman mengenai negara maritim, visi yang diusung ini menawarkan perubahan perspektif nasionalisme dari yang sudah ada. Semula nasionalisme Indonesia cenderung darat, namun kesadaran akan negara kepulauan dan dengan adanya visi PMD maka dapat mengubah cara pandang menjadi nasionalisme yang bersifat kemaritiman. Perubahan ini bukan merupakan kesalahan mengingat pasca era kolonialisme ada keterputusan identitas bahari di Indonesia. Laut, dan pulau-pulau di wilayah sendiri

disebut sebagai ‘pulau terluar’ seolah wilayah ini bukan bagian dari Indonesia. Masyarakat pesisir laut Indonesia pun cenderung hidup dalam kemiskinan, padahal laut adalah sumber daya terbesar bagi Indonesia.

Sehingga menurut Paskarina, visi PMD ini merupakan bukti adanya kehadiran negara dan pemerintah sebagai wujud nyata untuk mempertahankan aset Indonesia, dengan pengamanan wilayah pesisir, wilayah strategis, pulau-pulau, jaringan perdagangan antar pulau dan aset kelautan lainnya. Diharapkan, salah satu tujuan akhir dari visi ini adalah kesejahteraan rakyat dengan membangun infrastruktur seperti pelabuhan, lalu lintas laut yang aman yang menciptakan penyaluran barang dapat mencapai ke wilayah pelosok dengan harga yang adil, dan manfaat kelautan ini tidak hanya diperoleh oleh wilayah pesisir namun juga bagi masyarakat Indonesia (Paskarina, 2016).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merupakan kementerian yang ditunjuk untuk menjadi jembatan utama penerapan dari visi PMD. Adapun strategi terkait dengan visi PMD ini adalah dirumuskannya visi Kementerian Luar Negeri dengan tiga misi yang dirancang oleh Kemlu untuk dilaksanakan oleh seluruh unit dan satuan kerja dari tahun 2015-2019, yaitu:

“Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat”

Adapun misi yang di rencanakan oleh Kemlu, diantaranya:

1. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional
2. Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjuror pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional

3. Mewujudkan kapasitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang mumpuni

Meski tidak menyebutkan adanya redaksi Poros Maritim Dunia namun Kemlu secara jelas menyebutkan bahwa dalam hal penerapan visi PMD, Kemlu merumuskannya melalui misi ke pertama yang pada akan menjadi pembahasan pada bab ini, yaitu adanya kalimat:

“Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional”

Lebih lanjut, menurut Kemlu misi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan:

“Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh”.

Dalam maksud dan pengertiannya, misi pertama tersebut bisa diartikan bahwa Kemlu yang memposisikan Indonesia sebagai negara maritim menginginkan adanya peran aktif di forum-forum internasional guna memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Berkaitan dengan forum internasional, Indonesia menargetkan kepemimpinan di organisasi internasional sebagai modal utama untuk mendapatkan pengaruh terhadap pengambilan kebijakan di lingkup bilateral, regional, mapupun global. Secara tidak langsung, IORA juga menjadi salah satu organisasi internasional yang menjadi target kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim, mengingat posisi Indonesia sebagai ketua pada tahun 2015-2017.

Kemlu juga menekankan bahwa peran strategis ini akan menerapkan strategi *multiplication of authority* atau adanya tindakan bersama dari berbagai lapisan untuk menuju tujuan bersama. Kemlu juga akan menjadikan kawasan Samudera Hindia sebagai perhatian utama, sehingga Indonesia perlu berperan aktif dalam memimpin (Kementrian Luar Negeri, 2015). Sementara menurut Roza (2015), adanya penerapan visi

PMD ini dengan IORA adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh secara strategis, yaitu pengintegrasian di dua kawasan Samudera Hindia dan Pasifik sebagai bentuk pelaksanaan politik luar negeri kawasan. Tentunya hal ini akan memperluas cakupan politik luar negeri Indonesia mengingat peran vital Indonesia selama beberapa waktu yang terfokus pada ASEAN. Keaktifan Indonesia pada IORA juga mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia yang memiliki permasalahan kemaritiman yang sama dengan IORA. Kelima pilar Poros Maritim Dunia Joko Widodo dengan enam prioritas utama IORA memiliki kesamaan kepentingan. Namun titik temu kepentingan utama yang sama antara visi PMD dengan enam prioritas IORA terdapat pada agenda dalam mewujudkan keamanan maritim, dan pengelolaan sumber daya (Roza, 2015).

Tantangan IORA yang berupa ancaman tradisional maupun non tradisional seperti *piracy, illegal fishing, human trafficking, drug and arm smuggling*, polusi maritim, dan perubahan iklim tentunya memiliki kesamaan dengan permasalahan kemaritiman Indonesia. Terlebih jika tujuan akhir dari kedua hal ini adalah peningkatan ekonomi bagi Indonesia, maupun wilayah Samudera Hindia. Kesesuaian strategi maritim regional yang dipakai IORA juga sesuai dengan visi Poros Maritim Dunia, dimana terdapat penyediaan program pengembangan kapasitas bagi masyarakat negara anggota agar siap menghadapi tantangan kemaritiman. Strategi ini secara tidak langsung juga mendorong industri maritim yang bersifat inovatif, kompetitif, dan ramah terhadap lingkungan. Disisi lain tambahan manfaat seperti pertukaran informasi dan keilmuan, pengembangan kapasitas atau *workshop*, dan bantuan teknis yang difasilitasi IORA akan menjadi poin penting bagi manfaat IORA bagi penerapan visi Poros Maritim Dunia.

B. Peluang Indonesia di IORA

Harus diakui bahwa IORA berkembang menjadi organisasi yang signifikan ketika diketuai oleh India kemudian dilanjutkan oleh Australia. Dampak program kerja yang

dihasilkan cukup signifikan terutama dengan adanya enam prioritas atau fokus yang dimiliki IORA. Kemudian dilanjutkan pengadaan bermacam program pengembangan kapasitas (*capacity building*) di setiap enam sektor tersebut. Keenam bidang prioritas ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi negara-negara anggotanya.

Sebelum melihat peluang Indonesia perlu dipahami bahwa posisi Indonesia di IORA merupakan salah satu negara yang diperhitungkan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa sektor diantaranya seperti ekonomi perdagangan, Indonesia menjadi salah satu dari enam negara anggota IORA yang memiliki volume perdagangan mencapai 96%, keenam negara tersebut diantaranya adalah Singapura, Malaysia, India, Indonesia, Australia dan Afrika Selatan. Indonesia juga memiliki pasar yang luas dengan total populasi 249 juta jiwa, jauh lebih banyak dari negara anggota lain dan GDP 868,3 triliun dan pendapatan perkapita USD 3.500. Nilai ekspor dan impor Indonesia dengan negara di IORA juga terbilang besar dengan jumlah terbesar yaitu dengan negara India, Malaysia, dan Singapura.

Tabel 1 Perdagangan Indonesia dengan Negara IORA tahun 2013

NEGARA	EKSPOR	IMPOR	NERACA PERDAGANGAN	JUMLAH PERDAGANGAN
AFRIKA SELATAN	1.270.335,0	624.931,1	645.403,9	1.895.266,1
AUSTRALIA	4.370.482,1	5.038.166,5	-667.684,3	9.408.648,6
BANGLADESH	1.068.459,5	90.169,8	978.289,7	1.158.629,3
IRAN	469.356,4	99.047,2	370.309,2	568.403,6
INDIA	13.031.302,7	3.963.980,3	9.067.322,5	16.995.283,0
KENYA	233.201,4	13.964,4	219.237,0	247.165,8
MADAGASCAR	68.087,4	10.506,8	57.580,6	78.594,2
MALAYSIA	10.666.609,5	13.322.533,0	-2.655.923,5	23.989.142,4
MOZAMBIK	120.764,8	57.939,5	62.825,3	178.704,3
MAURITIUS	69.630,7	8.648,8	60.981,9	78.279,5
OMAN	209.388,3	252.951,6	-43.563,4	462.339,9
REPUBLIK KOMORO	2.807,9	49,7	2.758,2	2.857,6
SEYCHELLES	6.145,3	853,8	5.291,5	6.999,1
SINGAPURA	16.686.278,6	25.581.521,0	-8.895.242,4	42.267.799,7
SRI LANKA	390.925,9	49.531,8	341.394,1	440.457,7
TANZANIA	192.714,5	51.588,2	141.126,3	244.302,7
THAILAND	6.061.870,0	10.703.097,3	-4.641.227,3	16.764.967,2
UNI EMIRAT ARAB	1.589.066,7	1.809.358,0	-220.291,3	3.398.424,7
YAMAN	156.311,9	3.069,5	153.242,4	159.381,3

Sumber: (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, 2014)

Berkaitan dengan politik keamanan yaitu geostrategis, posisi Indonesia sangat strategis sekaligus rawan. Hal ini karena kedua wilayah ini menjadi ajang perebutan kekuasaan dan pengaruh diantara negara-negara besar. Tantangan berkaitan dengan *balance of power*, menjadi perlu untuk diperhatikan. Negara seperti India, yang di dukung Amerika Serikat dengan Tiongkok yang di dukung Pakistan serta Rusia dalam persaingan memerangi terorisme, energi dan ekonomi tentunya akan memerlukan pentingnya peran Indonesia karena sangat rawan konflik.

Pada sektor manajemen resiko bencana alam Indonesia memiliki pengalaman yang mumpuni dalam penanganan bencana alam, salah satu contohnya adalah tsunami di Aceh. Kredibilitas ini ditambah pasca dipercaya ASEAN untuk mendirikan *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center)* di Jakarta tahun 2011.

Sementara untuk melihat peluang Indonesia untuk berkontribusi bagi IORA sebenarnya dapat dilihat melalui evaluasi IORA selama terbentuk. Anggota IORA memiliki keberagaman dan kesenjangan kekuatan dari beberapa sektor seperti politik dan ekonomi. Hal ini menjadi salah satu penghambat liberalisasi perdagangan dan perluasan keanggotaan yang menjadi salah satu tujuan utama IORA. IORA juga terlihat masih belum menjadi prioritas kerjasama bagi beberapa negara anggota, hal ini dikarenakan kurangnya peran kesekretariatan, jumlah pertemuan terutama pertemuan CSO yang masih minim sehingga kerjasama kurang optimal, kurang kuatnya keberadaan IORA akibat kurangnya publikasi dan signifikansi peran IORA selama ini, serta tingkat pertemuan IORA yang belum menyentuh tingkat kepala negara/pemerintahan yang menyebabkan agenda yang dimiliki kurang memiliki kekuatan yang bersifat mengikat.

Melalui evaluasi ini dapat dilihat peluang Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai ketua IORA beberapa diantaranya adalah dengan meningkatkan peran negara-negara yang bersifat *Middle Developed Countries (MDCs)*, *Newly*

Industrialised Countries (NICs), Developing Countries, Least Developed Countries (LDCs). Dalam dua tahun terakhir negara-negara tersebut telah meningkat partisipasinya terutama setelah adanya bantuan dana *special fund* yang saat itu bernilai USD 2 juta. Sehingga selain peningkatan peran, adanya perbaikan dalam sektor keuangan dan iuran IORA dirasa perlu. Penguatan elemen organisasi di dalam IORA juga menjadi peluang Indonesia, seperti lebih memaksimalkan peran Negara Anggota Mitra Wicara seperti Tiongkok yang beberapa kali memberikan dana khusus bagi IORA dan beberapa Negara Mitra Wicara lainnya ditambah membangun kerjasama dengan beberapa pihak lain di luar IORA. Pertukaran sebagai peserta peninjau di organisasi luar mewakili IORA dan mengajak organisasi lain menjadi peninjau di IORA juga diperlukan untuk meningkatkan peluang kerjasama yang lebih luas.

Selain itu peluang yang lebih bersifat mendasar dan mengarah ke internal organisasi adalah dengan adanya perbaikan kesekretariatan. Perbaikan ini justru merupakan salah satu bagian penting karena merupakan tindak lanjut dari program yang di rencanakan. Amandemen piagam IORA juga sangat penting untuk perbaikan mendasar IORA, seperti nomenklatur, peran sekretariat dan kontribusi tahunan. Para negara anggota juga telah sepakat untuk mengajukan amandemen terhadap Piagam IORA.

Sementara melalui sebuah Kajian Mandiri oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf), dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), dalam kajian ini Kemenlu menyebutkan bahwa terkhusus IORA, strategi kebijakan umum yang seharusnya digunakan oleh Indonesia adalah:

- i. Menghasilkan deklarasi/dokumen sejenis yang mencatumkan target target khusus dan *plan of action* dalam jangka waktu tertentu;
- ii. *Engagement* yang lebih terarah dengan organisasi regional lainnya yang terkait;

- iii. Meningkatkan peran sekaligus kapasitas *Least Developed Countries* (LDCs), termasuk dengan mendorong kerja sama yang setara dan saling menguntungkan (*mutual and beneficial cooperation*);
- iv. Meningkatkan level forum kerja sama;
- v. Meningkatkan *public awareness* kepada pemangku kepentingan di negara-negara anggota; dan
- vi. Menyusun *Code of Conduct* berkelakuan baik sebagai salah satu upaya Indonesia membentuk arsitektur kawasan Samudra Hindia yang aman, damai dan sejahtera.

Melalui kajian ini Kemlu juga menginginkan adanya inisiatif dalam lingkup organisasi dan mekanisme kerjasama. Seperti adanya perluasan keanggotaan, iuran keanggotaan, adanya *Role of Procedure* yang lebih jelas dari mekanisme kepemimpinan “Troika”, dan adanya penguatan sekretariat. Sementara inisiatif dalam pengembangan program IORA dari Kemlu berencana untuk memperkuat enam area kerjasama IORA. Dengan pembuatan road map atau kerangka kerja setiap prioritas area, seperti pembentukan *Working Group* baru, dan kemungkinan penambahan kerjasama prioritas baru. Sehingga melihat dari strategi yang disarankan oleh Kajian Mandiri ini maka strategi yang akan di gunakan Indonesia sudah sesuai dengan evaluasi IORA dan peluang-peluang yang dimiliki Indonesia ketika menjadi ketua IORA (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, 2014).

Sementara bagi Indonesia sendiri terdapat beberapa peluang yang bisa dimaksimalkan untuk memperkuat kekuatan maritim Indonesia sekaligus menjadi perwujudan dari visi PMD. Diantara beberapa kepentingan Indonesia yaitu pertama dan menjadi yang utama, pada sektor politik keamanan, terkhususkan untuk menjadi media untuk mengintegrasikan kepentingan di bidang keamanan maritim seperti perlindungan jalur perdagangan dan sumberdaya, pengamanan kejahatan

trans-national, sengketa wilayah dan misi penyelamatan bencana atau kecelakaan.

Kedua yaitu sektor ekonomi, IORA berpotensi meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor *trade, tourism, investment* (TTI) apalagi mengingat total jumlah penduduk Samudera Hindia berjumlah 2,1 miliar orang dengan sumber daya yang melimpah. Sasaran peningkatan ekonomi yang bisa dimaksimalkan adalah dari sektor perikanan, perhubungan laut, energi dan sumber daya mineral. Menurut Yose Rizal dari Kepala bagian Ekonomi *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) Indonesia dalam Sayekti (2017) juga membenarkan bahwa kerjasama dan integrasi ekonomi akan dapat menyumbang perkembangan yang signifikan terhadap perekonomian tingkat domestik. Pernyataan ini berdasarkan survei oleh CSIS tahun 2013 pada perusahaan yang berjumlah 500 dengan respon positif, yaitu ekspor menjadi lebih baik. Hal ini tidak hanya pada perusahaan besar namun juga bagi perusahaan kecil menengah atau UKM.

Bukti peningkatan ekonomi juga terdapat pada perkembangan investasi dari negara IORA terhadap Indonesia. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menghasilkan kesimpulan bahwa kerjasama ini membawa momentum positif dalam investasi. Adapun lima negara tertinggi dalam berinvestasi adalah Singapura, Malaysia, Mauritius, Australia, dan Thailand. Sementara investasi utama adalah dalam bidang jasa, atau industri jasa yang bersifat tersier.

Tabel 2 Pertumbuhan Investasi tahun 2012-2016

Tahun	Nilai Investasi (Miliar USD)	Pertumbuhan (%)
2012	7,5	-
2013	6,6	-12
2014	9,2	39,39
2015	9,5	3,26
2016	11,7	23,16

Sumber: (Sayekti, 2017)

Ketiga, adalah sektor sosial budaya karena kebudayaan di negara-negara Samudera Hindia juga masih saling berkaitan satu dengan yang lain dalam persebaran dan perkembangannya seperti Indonesia dengan Sri Lanka dan Afrika Selatan. Indonesia juga merupakan negara yang berasal dari beragam suku bangsa, agama dan bahasa. Keanekaragaman ini menjadi modal penting pertukaran budaya Indonesia. Masih berkaitan dengan sosial budaya yaitu pariwisata, yang mana menargetkan mencapai 20 juta wisatawan asing untuk tahun 2019. Selain itu menurut data Kementerian Pariwisata Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp. 200 triliun hanya untuk 10 tujuan wisata. Pendanaan ini berasal dari swasta, investasi publik, Penanaman Modal Asing (PMA), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta dari perbankan. Sehingga memang keberadaan forum internasional sangat diperlukan untuk mencapai target ini.

Keempat adalah bidang pelestarian lingkungan hidup. Pada bidang ini Indonesia menekankan adanya perlindungan sumber daya alam yang rentan akan adanya pencemaran, terutama limbah industri. Diharapkan akan munculnya otoritas yang mampu mengatur batas pencemaran serta mekanismenya. Sebelumnya Indonesia juga mengambil pelajaran dari adanya kasus Montara dengan kerugian sekitar Rp. 22 triliun yang mencemari Celah Timor karena bocornya kilang minyak lepas pantai dari Australia.

C. Indonesia sebagai Ketua IORA

IORA menggunakan konsep “Troika” dalam mekanisme penetapan ketua. Konsep ini merupakan konsep dengan menggunakan 3 (tiga) negara dengan komposisi ketua IORA periode sebelumnya, ditambah Ketua IORA yang sedang aktif menjabat serta Wakilnya (Wakil akan menjabat sebagai ketua di periode berikutnya). Pada komposisi ini ketiga negara akan berkumpul secara aktif di sela Pertemuan Tingkat Menteri (CoM) dan Pertemuan Tingkat Pejabat Senior (CSO) untuk menyukseskan dan meningkatkan agenda IORA.

Mengingat IORA merupakan organisasi strategis di wilayah Samudera Hindia, posisi keketuaan Indonesia menjadi sangat krusial terutama dalam proses pengambilan keputusan di IORA karena menyangkut wewenang secara struktural keorganisasian. Dalam sistem atau struktur organisasi, konsep Troika sesuai dengan teori elit dalam suatu sistem politik. Dimana terdapat sejumlah pemegang kekuasaan yang berjumlah lebih sedikit dibanding pihak yang dipimpin. Sementara menurut Vilfredo Pareto dan Robert Michels ketika menjadi elit dalam suatu struktur maka setidaknya terdapat beberapa asas, seperti memiliki; kekuasaan politik, mendistribusikan kekuasaan, secara internal elit bersifat homogen atau memiliki nilai atau kepentingan yang sama, bersifat eksklusif, dan bersifat otonom karena kebal akan keputusan yang dibuatnya.

Konsep Troika yang terdiri dari Australia, Indonesia, dan Afrika Selatan ini tentunya sesuai dengan teori elit diatas karena posisi Troika ini berada di atas *Council of Minister*. Ketiga negara yang tergabung di dalam Troika berhak menentukan arah perkembangan dari IORA sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing, terutama ketua yang sedang menjabat. Sementara, *Council of Minister* akan bergerak pada tataran operasional, dan tindak lanjut dari keputusan Troika. Posisi CoM yang berada pada tingkat menteri terutama dalam kasus ini yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia juga kemudian menambah peranan penting penerapan-penerapan agenda yang menjadi prioritas Indonesia selama menjadi ketua IORA. Keohane & Nye dalam Triwahyuni (2010) menyebutkan bahwa sistem internasional memiliki karakter yang kompleks dan independen, dan organisasi internasional seperti IORA adalah salah satu bagian yang terintegrasikan dalam sistem internasional tersebut. Sehingga terdapat hubungan saling ketergantungan antara organisasi dengan negara yang membutuhkan organisasi tersebut. Sehingga apabila Indonesia ketika menjabat sebagai ketua IORA mampu untuk menguatkan interdependensi negara dengan membuat terobosan yang sesuai

dalam program IORA, maka pengaruh organisasi bagi tiap negara anggota juga akan semakin kuat.

Namun pemikir hubungan internasional tradisional berpendapat bahwa struktur adalah istilah material yang juga bersifat operasional seperti adanya distribusi kekuasaan, dan memperlakukan struktur sebagai pembatas para aktor yang terlibat. Artinya seberapa elitpun suatu aktor, perilaku untuk meraih kepentingan nasionalnya akan selalu dibatasi oleh proses dan peraturan atau regulasi dalam sistem internasional. Sementara bagi konstruktivis, mengidentifikasi struktur suatu sistem adalah suatu hal yang kolektif yang terdiri dari ide atau gagasan, aturan, norma, dan kepercayaan yang tidak hanya membatasi, namun juga mengkonstruksi identitas dan kepentingan, serta mendefinisikan standar kepemimpinan yang tepat bagi aktor.

Selain itu dalam Sugito (2016), organisasi antar negara yang bertujuan untuk ekonomi, seperti IORA memiliki peranan yang dapat dimaksimalkan apabila memegang posisi sebagai ketua, yaitu; menghubungkan aktivitas informasi dan pemrosesan data, dapat memberikan aktivitas normatif seperti peneguran atau peringatan, kemampuan untuk membuat peraturan atau kebijakan, aktivitas pengawasan pengaturan, dan pelayanan aktivitas operasional seperti pemberian bantuan dan asistensi program-program yang ada.

1. Terpilihnya Indonesia sebagai Ketua IORA

Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai Wakil Ketua IORA pada November 2013 di Perth, Australia tepatnya saat diadakan Pertemuan Tingkat Menteri ke 13. Sehingga Troika yang berlaku saat itu yaitu India sebagai Ketua IORA periode sebelumnya (2011-2013), Australia menjabat sebagai Ketua (2013-2015). Indonesia sebagai Wakil Ketua IORA, secara otomatis akan menjadi ketua pada periode 2015-2017.

Pertemuan *the 15th IORA Council of Ministers Meeting and Its Related Meeting* dilakukan pada 20-23 Oktober 2015 di kota Padang. Pertemuan ini sendiri menghasilkan kesepakatan antara lain: *Padang*

Communique, Declaration on the Establishment of an Ad Committee on the IORA Concord (Jakarta Concord), dan IORA Maritime Cooperation Declaration. Selain itu ketika Indonesia menjabat sebagai ketua, terdapat terobosan untuk membawa sebuah tema pada masa kepemimpinan Indonesia yaitu “*Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean.*”. Dengan mengangkat tema ini, Indonesia menjadi ketua pertama yang menggunakan tema dalam masa kepemimpinannya.

2. Peran dan Program Indonesia dalam Mempengaruhi Pengambilan Kebijakan IORA

Pada tahun 2016 terhitung secara umum telah dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan anggota IORA dan beberapa pemangku kepentingan terkait yaitu: *Blue Economy Summit II, IORA – IRENA Renewable Energy Technical Working Session; The First Ad Hoc Committee of the Indian Ocean Rim Association (IORA) Concord; The 2nd Ad Hoc Committee of the Indian Ocean Rim Association (AhCM) Concord; The 22nd Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG); The 22nd Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF); The 18th Committee of Senior Officials (CSO); dan The 16th Council of Ministers Meeting (COM).* Enam bidang yang menjadi fokus pembahasan kedua belas program yang sekaligus menjadi rancangan kerjasama strategis ini adalah: keamanan maritim, budaya perikanan dan perairan, energi, manajemen resiko bencana, teknologi dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan pertukaran budaya.

Indonesia sendiri telah berkontribusi pada beberapa bagian selama tahun 2016. Diantaranya yaitu:

Memberikan usulan pada *The 3rd IORA Ad-Hoc Committee Meeting (AhCM)*, bagian *Draft 4 IORA Concord* dan *Draft IORA Action Plan*. Indonesia mengusulkan *fisheries crime* pada *Concord*, dengan term “*crimes in the fisheries sector*”. Kemudian pada *The 16th IORA Council of Ministers Meeting (COMM)*, 27

Oktober 2016, Indonesia mengusulkan kesepakatan untuk mengadopsi *IORA Concord* kepada Kepala Negara/Pemerintahan ketika KTT IORA, dengan salah satu keluaran dokumen yaitu *Declaration on Countering Violent Extremism*.

Delegasi Indonesia juga mendorong penerapan perikanan berkelanjutan atau *sustainable fisheries*, melalui pemberantasan *IUU Fishing* dan memperluas kerjasama melalui mekanisme *public-private partnership* dalam menerapkan *blue economy* sesuai dengan *Abu Dhabi 2016 Blue Economy Declaration* pada *The Blue Economy Summit II* dan *IORA/IRENA Renewable Energy Technical Working Session*, di Abu Dhabi pada tanggal 18-22 Januari 2016..

Ketika di Pretoria tanggal 18 Februari 2016, saat dilaksanakan *The 17th Meeting of the Working Group of Heads of Missions Indian Ocean Rim Association*, Diterimanya usulan utusan RI ide berkaitan dengan: *The First Ad Hoc Committee on the IORA Concord*; *International Symposium "IORA 20th Anniversary on Learning from the Past and Charting the Future"*, dan *Indian Ocean Dialogue III*;

Indonesia telah menyusun *NonPaper IORA Concord* sebagai bentuk upaya awal untuk mendorong proses pembahasan penyusunan *IORA Concord*; Dibuat bersama para TROIKA, *draft Outline IORA Concord* ini diterima oleh negara-negara anggota. Penyusunan ini dilakukan di Bali tanggal 14-18 Maret 2016, pada *The 1st Ad-Hoc Committee Meeting on IORA Concord*.

Lebih lanjut untuk tahun 2017 Menurut Desra Percaya sebagai Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Indonesia, salah satu tujuan utama kepemimpinan Indonesia di IORA adalah terlaksananya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antar negara anggota sebagai tindak lanjut komitmen dan momentum perkembangan IORA dibawah Australia dan India. KTT diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pentingnya

IORA dan tindak lanjut dari program yang dimiliki IORA. Upaya ini sendiri diharapkan dapat diperkuat dengan pengesahan *IORA Concord*, *IORA Action Plan*, dan *Declaration on Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism*. *IORA Concord* adalah perwujudan dari visi dan norma kerjasama IORA di waktu yang akan datang, agar lebih efektif dan tanggap dalam menanggulangi permasalahan di Samudera Hindia. Sementara *IORA Action Plan* merupakan rencana program yang bersifat strategis pada tiap fokus area yang dimiliki IORA dan rencana ini bersifat lintas sektoral yang menargetkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Sehingga fungsi dari IORA akan lebih dirasakan oleh masyarakat negara anggota. Ketiga dokumen ini akan menguatkan kerjasama IORA menjadi lebih progresif setelah 20 tahun.

KTT tersebut akhirnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan tema “*Strengthening Maritime Cooperation for Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean*” pada 5-7 Maret 2017 di Jakarta Convention Center, Senayan. *IORA Concord* yang telah disahkan di KTT ini kemudian disebut sebagai *Jakarta Concord*. Beberapa poin yang disepakati di dalam perjanjian ini adalah memajukan keamanan dan keselamatan maritim, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi, memajukan pengembangan dan pengelolaan ikan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab. Perjanjian ini juga memperkuat dua *crosscutting issue* IORA yaitu *Blue Economy* dan *Women Empowerment* ditambah tiga isu lain yaitu demokrasi tata pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi, serta hak asasi manusia.

Secara total terdapat kurang lebih 30 pertemuan, program, maupun proyek sebagai upaya Indonesia sebagai ketua IORA. Dari jumlah tersebut, adapun peran lain yang dianggap signifikan oleh Indonesia antara lain yaitu:

a. *The 3rd Indian Ocean Dialogue*

Indian Ocean Dialogue (IOD) merupakan forum pertemuan yang terdiri dari golongan akademisi, pemerintah dan pebisnis. Pada pelaksanaan ini, Indonesia mengangkat tema “*Addressing Maritime Security Challenges in the Indian Ocean Through Enhanced Regionalism*” yang kemudian di hadiri oleh 80 peserta dari 25 negara. 18 diantaranya adalah negara anggota, sementara 6 negara dari negara mitra dialog, dan 1 negara dari negara yang memiliki kepentingan. Pertemuan ini menghasilkan *Padang Consensus* yang bertujuan untuk menghadapi tantangan keamanan maritim di Samudera Hindia.

Beberapa isu keamanan yang di bahas adalah kejahatan non-tradisional seperti, penangkapan ikan ilegal, perdagangan obat dan senjata, penyelundupan manusia, dan sebagainya. Lebih lanjut, pertemuan ini juga membahas mengenai upaya untuk meningkatkan kerjasama strategis antar negara anggota IORA yang bersifat kemiliteran. Terutama yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan maritim.

b. *International Symposium “IORA 20th Anniversary: Learning from Past and Charting the Future*

Simposium ini dilaksanakan di Yogyakarta, 14-15 September 2016 yang bertujuan sebagai media bertukar pikiran mengenai proyeksi kedepan dari IORA seperti tantangan, peluang, strategi dan penyelesaian permasalahan di IORA. Dengan diikuti oleh 12 negara anggota dan 6 negara mitra wicara, simposium ini menghasilkan tiga bidang utama proyeksi tersebut yaitu pada bidang Kerjasama Ekonomi, Arsitektur kawasan Samudera Hindia, dan Sosial Budaya. Dari ketiga bidang tersebut terdapat 11 poin hasil pembahasan

yang kemudian disebut sebagai “*Yogyakarta Message*”. Beberapa poin penting dari pertemuan ini adalah pentingnya pemberdayaan ekonomi mikro dan penguatan UKM serta pentingnya *Blue Economy*. Dalam bidang arsitektur kawasan juga perlu dipusatkan dengan pelaksanaan yang terbuka, transparan, inklusif dan evolusioner serta berlandaskan pada hukum atau aturan internasional. Diplomasi budaya juga penting untuk peningkatan hubungan antar negara anggota serta pentingnya isu dari kesetaraan gender.

c. *IORA Business Innovation Centre (BIC)*

BIC merupakan program yang didalamnya terdiri dari *Working Group* yaitu WGTI, IORAG, dan IORBF. BIC bertujuan sebagai wadah untuk menciptakan penemuan, gagasan, atau ide baru berkaitan dengan inovasi-inovasi bisnis di kawasan Samudera Hindia sekaligus menjadi penghubung bagi ketiga *Working Group* terkait.

d. *IORA Guide for Investment*

Hasil dari pertemuan ini adalah untuk mempercepat penerapan ide yang berkaitan dengan pembuatan *IORA Web Trade Repository* dan *IORA Guide for Investment*. Adapun tujuan dengan adanya kedua hal ini adalah terkumpulnya data perdagangan negara anggota IORA secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan demikian dapat juga dimanfaatkan sebagai media informasi berkaitan dengan kebijakan dalam berinvestasi di negara anggota IORA.

e. *The 2nd Blue Economy Conference*

Merupakan pertemuan yang di hadiri oleh para CSO dalam menangani permasalahan kelangkaan dari sumber daya, penjaminan kemakmuran jangka panjang, dan kunci dari pembangunan berkelanjutan. Pertemuan ini menghasilkan dokumen “*Jakarta Declaration on*

the Blue Economy” yang berfokus pada mengembangkan *Blue Economy* yang berkelanjutan.

f. *IORAG Cultural Expo*

Pelaksanaan pameran kebudayaan ini berbarengan dengan diadakannya *IORA Summit 2017*, yaitu pada tanggal 7 Maret 2017. Tema yang diambil dalam acara ini adalah “*The Great Voyage Indian Ocean*” yang menampilkan foto, peta klasik, artefak, seni dan foto wisata nusantara. Pameran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sejarah mengenai Nusantara dan pelayaran-pelayaran yang melintasi Samudera Hindia dan Nusantara.

Adapun peran lain Indonesia adalah; mengusulkan Joint Research di antara para akademisi IORAG. Topik penelitian gabungan yaitu isu-isu yang menjadi prioritas negara-negara anggota. Konsep usulan ini berjudul “*Coastal Health and Wealth in Indian Ocean*”; pembentukan *IORA Business Travel Card*.

Secara umum, peran yang telah dilakukan Indonesia selama masa kepemimpinannya di periode 2016-2017 telah membawa progress bagi IORA. Kegiatan yang telah dilakukan Indonesia juga telah mencakup seluruh enam fokus sektor di IORA. Kegiatan seperti *The 3rd Ocean Dialogue, International Symposium “IORA 20th Anniversary: Learning from Past and Charting the Future”*, yang bersifat umum atau multisektor, hingga *The 2nd Blue Economy Conference* atau *IORAG Cultural Expo: The Great Voyage Indian Ocean* yang lebih bersifat spesifik terhadap fokus IORA. Indonesia juga telah berperan dalam beberapa pertemuan yang menargetkan perbaikan pada institusi atau keorganisasian di dalam IORA, seperti pada beberapa kali kesempatan ketika diadakannya *Ad-Hoc Committee Meeting on IORA Concord*. Sementara tonggak utama bagi kontribusi Indonesia sebagai ketua IORA adalah

dengan diadakannya KTT IORA, atau *IORA Summit 2017*. Sehingga tujuan utama memperkuat komitmen dan momentum perkembangan IORA tercapai dengan terbentuknya *IORA Concord* dan beberapa hasil dokumen lain, serta mampu meningkatkan kesadaran pentingnya IORA bagi para kepala negara dan legitimasi dari tindak lanjut dari program yang dimiliki IORA.

Bagi Indonesia sendiri dan visi PMD, KTT ini merupakan kesempatan utama untuk menegaskan visi PMD dan pembuktian penerapan dari visi tersebut. KTT dan peran sebagai ketua IORA sekaligus dapat membantu Indonesia mempercepat mewujudkan visi PMD. Ditambah lagi menurut Rezasyah (2017), dapat dipahami alasan dibalik upaya Indonesia yang berjuang untuk benar-benar membuat *IORA Concord* selesai ketika menjadi ketua IORA. Karena kemudian Indonesia akan lebih dapat memasukkan kepentingan dan bermacam bentuk dari kerjasama kemaritiman yang bertujuan akhir untuk juga dapat mewujudkan dari visi PMD melalui *IORA Concord*. Meskipun dapat dilihat bahwa fokus utama dari Concord ini adalah untuk menyediakan kontribusi nyata dalam menjaga kerjasama, keamanan dan stabilitas di wilayah Samudera Hindia namun lebih lanjut, Rezasyah menilai bahwa tantangan sebenarnya setelah terbentuknya Concord tersebut adalah bagaimana cara Indonesia menunjukkan perannya sebagai negara kepulauan pada IORA, sekaligus upaya meraih status Poros Maritim Dunia melalui keamanan maritim, manajemen sumberdaya maritim dan diplomasi maritim.